



**Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Magelang
Masa Bupati H.Achmad 1967-1979**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh:
Rivaldi Gustaf Masloman
NIM 13030112140101**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Rivaldi Gustaf Masloman, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), maupun Strata Tiga (S-3), pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, April 2019

Penulis

Rivaldi Gustaf Masloman

NIM 13030112140101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”.

(LESSING)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”.

**(NELSON
MANDELA)**

Dipersembahkan untuk:

Ibu, Bapak, kakak dan adik serta semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku.

PERSETUJUAN

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407111990011001

Skripsi dengan Judul “Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Masa Bupati H.Achmad 1967-1979”, yang disusun oleh Rivaldi Gustaf Masloman (13030112140101) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Kamis, 11 April 2019.

Ketua,

Anggota I,

Dr. Agustinus Supriyono, M.A.
NIP 195503151987031001

Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407111990011001

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.
NIP 195407251986032001

Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.
NIP 196703111993031004

Mengesahkan,

Dekan

Dr. Nurhayati, M. Hum.
NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan akal pikiran kepada makhluk-Nya. Dengan kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Masa Bupati H.Achmad 1967-1979”. Skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Strata-1 pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dra. Sri Indrahti, M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan maksimal.

Ucapan terima kasih dan hormat juga penulis haturkan kepada Departemen Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Magelang yang telah bersedia memberikan informasi, dan arsip-arsip kegiatan guna penelitian skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada staf Arsip dan Perpustakaan, dan staf senior

Pemerintah Daerah yang telah purna di Kabupaten Magelang yang telah memberikan banyak informasi yang berguna untuk penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang hebat, Agus dan Sri Setyowati atas doa dan nasihatnya yang selalu mengiringi perjalanan penulis sejauh ini. Kepada kakak dan adik penulis, Ingrid Tera Septiani, dan Destanza Rafa, terima kasih atas motivasi dan dorongan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan di Departemen Sejarah, semua angkatan, terutama, teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas kebersamaanya selama ini.

Kiranya tidak ada hasil yang sempurna tanpa kerja keras dan ketekunan. Banyak juga suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh masih juga diikuti kesalahan, karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Untuk itulah penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis pribadi, dan semua pihak tanpa terkecuali, *amiin ya robbal 'alamiin*.

Semarang, April 2019

Penulis

Rivaldi Gustaf Masloman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 1960-1970	20
A. Kondisi Geografis Kabupaten Magelang	20
B. Kondisi Demografis Kabupaten Magelang	26
C. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Kabupaten Magelang	30
D. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Kabupaten Magelang	33
E. Kondisi Sosial-Politik Masyarakat Kabupaten Magelang	38
BAB III TOKOH BUPATI H.ACHMAD DAN UPAYA MENDAPATKAN BIAYA PEMBANGUNAN	42
A. Latar Belakang Keluarga dan Perjalanan Hidup Bupati H.Achmad	42
1. Latar Belakang Keluarga H.Achmad	42
2. Perjalanan Hidup H.Achmad	44
B. Tokoh Bupati H.Achmad	53

C.	Upaya Mendapatkan Biaya Pembangunan Kabupaten Magelang	59
1.	Retribusi Daerah	59
2.	Komoditas Kelembak	62
BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN MAGELANG		66
A.	Bidang Irigasi	66
1.	Irigasi Untuk Areal Pertanian	66
2.	Kebutuhan Air Untuk Masyarakat Kabupaten Magelang	71
B.	Bidang Pembangunan Gedung	74
1.	Gedung Sekolah	74
2.	Gedung Pemerintahan	77
3.	Gedung Bank Daerah	80
C.	Bidang Ekonomi dan Industri	84
1.	Industri Kerajinan Tangan	84
2.	Perusahaan Daerah	87
D.	Bidang Jaringan Transportasi	92
1.	Pembangunan Jalan	92
2.	Pembangunan Jembatan	103
3.	Pembangunan Terminal	107
BAB V KESIMPULAN		109
DAFTAR PUSTAKA		111
DAFTAR INFORMAN		116
LAMPIRAN		117

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Pemerintah dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Pemerintah dan Belanja Negara
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Inpres	: Instruksi Presiden
Ipeda	: Iuran Pembangunan Daerah
KKP	: Kantor Kas Pembantu
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NU	: Nadhlatul Ulama
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
Perda	: Perintah Daerah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
Pusdik	: Pusat Pendidikan
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SPMP	: Sekolah Pertanian Menengah Pertama
SPMA	: Sekolah Pertanian Menengah Atas
SK	: Surat Keputusan

DAFTAR ISTILAH

- Aqidah* : dalam Agama Islam memiliki arti iman.
- Babat Alas* : dalam bahasa jawa memiliki arti menebang hutan untuk membuat atau membuka lahan baru.
- Banyu* : dalam bahasa jawa artinya air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- Checkdam* : bangunan yang berfungsi menampung dan menahan sedimen dalam jangka waktu sementara, dan harus tetap melewatkan aliran air melalui tubuh bangunan.
- Dalan* : jalan untuk mencari rezeki.
- Geger Sapi* : bentuk badan jalan untuk daerah datar dengan bentuk seperti punggung sapi kurang lebih tingginya mencapai 6-8 cm di bagian tengah agak miring ke kanan dan ke kiri.
- Jaring Laba-laba* : konsep pembangunan jaringan transportasi yang memiliki bentuk seperti jaring laba-laba antar daerah pusat pemerintah dengan kecamatan-kecamatan.
- Networking* : kegiatan sosial ekonomi dimana kelompok pengusaha mengenali, menciptakan, atau bertindak terhadap peluang bisnis.
- Pamong Desa* : pengurus pemerintahan desa, seperti lurah, sekretaris desa, kepala dusun.
- Pioneer* : pelopor, penganjur, pembuka jalan.
- Retribusi* : pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa.
- The Right Man on The Right Place* : orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai kemampuannya.

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar:		
2.1	Peta Kabupaten Magelang 1979	22
3.1	Foto Gubernur Jawa Tengah Brigdjen Moenadi Bersama H.Ahmad saat proses pelantikan Bupati Magelang pada 1967	500
3.2	Foto Tanaman Kelembak	633
4. 1	Pembangunan Gedung Bank Daerah pada 1969	82
4. 2	Foto Gubernur Moenadi dan Bupati H.Achmad kunjungan kerja di Pemandian Kalibening yang sedang direnovasi 1970	89
4.3	Peta Jaringan Jalan Pusat Pemerintah dan Kecamatan di Kabupaten Magelang	96
4. 4	Peta Rute Jalan Tembus Kabupaten Magelang-Boyolali	100

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel:		
2. 1	Jumlah Curah Hujan Kabupaten Magelang Pada Tahun 1970	24
2. 2	Daftar Kecamatan di Kabupaten Magelang Pada 1960-1970	26
2. 3	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Pada 1962-1968	27
2. 4	Jumlah Penduduk Magelang Menurut Usia Pada 1968	28
2. 5	Daftar Sekolah di Kabupaten Magelang Pada 1969	29
2. 6	Jumlah Penduduk Magelang Menurut Agama Pada 1967	31
2. 7	Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Magelang pada 1968	35
2. 7	Jumlah Angkutan Umum Kabupaten Magelang pada 1968	36
2. 8	Jumlah Alat Transportasi di Kabupaten Magelang Tahun 1968	37
2. 9	Jumlah Sarana Komunikasi Kabupaten Magelang Pada 1976-1979	38
2. 10	Hasil Perolehan Kursi DPRD Magelang Pada 1971 dan 1977	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran:	
A. Surat Keputusan Bupati No.3/KD/PUB/1969	117
B. Surat Keputusan Bupati No.21/KD/PUB/1969	118
C. Surat Keputusan Bupati No.36/KD/Bup/1969	119
D. Pendapatan Komplek Pemandian Kalibening	121
E. Pendapatan RMU dan PAM Grabag	122
F. Surat Keputusan Bupati No.50/KD/1969	123
G. Surat Keputusan Bupati No.20/KD/PUB	124

RINGKASAN

Melalui metode sejarah, skripsi ini mengkaji Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Magelang, dari 1967 sampai dengan 1979. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Magelang direkonstruksi melalui konsep pembangunan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Bupati Magelang, H. Achmad yang menjabat selama 2 periode dari 1967 sampai dengan 1979. Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan yang terbagi menjadi wilayah produksi dan pemasaran, namun akses jalan antar kedua wilayah tersebut rusak parah. Pada 1967 kas daerah Kabupaten Magelang hanya sekitar Rp.230.000, yang tidak akan mencukupi biaya pembangunan jaringan transportasi. Dalam upaya mendapatkan biaya pembangunan jaringan transportasi, H. Achmad membuat kebijakan seperti pungutan atau retribusi daerah yang dapat menambah anggaran daerah.

H. Achmad telah berhasil membangun jaringan transportasi yang membentuk seperti '*jaring laba-laba*' antara daerah produsen dan daerah pemasaran yang dihubungkan melalui pembuatan jalan lini pertama. H. Achmad membuat jari-jari antara pusat pemerintah kabupaten dengan kecamatan terdekat, contohnya dari Magelang-Bandongan, Magelang-Mertoyudan, Magelang-Tegalrejo, setelah selesai, pembuatan jalan dilanjutkan dengan pembuatan jalan lini kedua, sebagai contoh Bandongan-Kaliangkrik-Kajoran dan Pakis-Ngablak-Grabag dibuat jalan tembus begitu seterusnya sampai kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dapat terhubung satu sama lain. Pada pembangunan di bidang lain Bupati H. Achmad juga telah berhasil melaksanakan pembangunan di bidang irigasi, pembangunan gedung sekolah, gedung pemerintah, industri, dan Bank Daerah.

SUMMARY

Through a historical method, this research discusses about Implementation of Development in Magelang Regency, from 1967 up to 1979. The Implementation of Development in Magelang Regency now constructed through the development concept of transportation network .

The construction in Magelang Regency by Regent, H. Achmad who served during 2 period from 1967 to 1979. Magelang Regency with having 21 sub district divided into a production and marketing area, but road access between both areas damaged. In 1967, Magelang local government budget only around Rp.230.000, who will not be sufficient the cost of building transportation network. In order to get the cost of building transportation network, H. Achmad make such a policy or regional distribution charges that can add regional budgets.

H. Achmad build a transportation network forming such 'cob webs' between regional production and marketing area which are connected through the making of the first line. H. Achmad build a webs between central government with nearby sub district, for example from Magelang-Bandongan, Magelang-Mertoyudan, Magelang-Tegalrejo, when it is finished making the followed by building the second line, for example from Bandongan-Kaliangkrik-Kajoran and Pakis-Ngablak-Grabag, build a road until far sub districts can be connected to each other. The transportation network conducted by H. Achmad also give the effect on development in other section such a irrigation system, school building, government building, industry, and infrastructure.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Perubahan sistem dari Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Pancasila atau Orde Baru membawa perubahan pada orientasi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Soeharto memulai pembangunan pada sebuah masa yang disebut dengan Orde Baru, yang terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu seperti peristiwa G 30 S/PKI dan krisis ekonomi. Orde Baru berjanji akan membangun ekonomi nasional dengan cara meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Program pembangunan nasional dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan nasional secara bertahap, yakni Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada awalnya kebutuhan akan biaya pembangunan sebagian besar diperoleh dari bantuan luar negeri.²

Kabinet pembangunan dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 Juni 1968 mengemban tugas yang dikenal sebagai Panca Krida, yang berisikan tentang stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (Repelita), melaksanakan pemilihan umum, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara.³ Pada tanggal 15 juni 1968 Presiden Soeharto menunjuk sebuah tim yang terdiri dari delapan ahli yang berlatarbelakang pendidikan Barat. Tim tersebut diberi tanggung jawab untuk memonitor atau mengatur perkembangan ekonomi. Selain itu opini, rencana, dan

¹M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: Serambi,2005), hlm. 558.

²R. Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.162.

³Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973* (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Sejahtera,1991), hlm.21.

rekomendasi mereka juga diharapkan dapat memberi arah pada pembangunan ekonomi. Hasil pemikiran para ahli tersebut dituangkan dalam bentuk Repelita. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diketuai oleh Prof. Wijoyo Nitisastro. Bappenas bertugas menyusun Repelita dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam waktu singkat, Bappenas berhasil menyusun Repelita I yang dilaksanakan pada 1969 sampai 1974.⁴

Tujuan utama Repelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Titik berat pada Pelita I ialah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian, sehingga pembangunan dalam bidang pertanian dikembangkan untuk menghentikan kemerosotan ekonomi.⁵ Pendekatan oleh pemerintah terhadap pembangunan merupakan sebuah komitmen yang sangat kuat pada pertumbuhan sosial ekonomi yang luas, khususnya pertumbuhan ekonomi pedesaan. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena mayoritas terbesar penduduk Indonesia tinggal di kawasan pedesaan dan sebagian besar orang miskin dan petani berlokasi di Jawa. Pelita sendiri mulai direalisasikan selama masa Orde Baru di seluruh penjuru daerah Indonesia.

Di daerah Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Magelang dimulai praktik Pelita bersamaan dengan adanya pergantian bupati pada tahun 1967. Pada Selasa pagi hari di pendopo gedung bekas Karesidenan Magelang, H. Achmad dilantik sebagai Bupati Magelang menggantikan bupati sebelumnya Adnan Widodo. Proses pelantikan bupati melalui sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang. Upacara pelantikan ini dihadiri oleh

⁴ Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 II* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm.153.

⁵ Bappenas, *Ikhtisar Pelaksanaan Repelita I* (Lampiran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 15 Agustus 1974), hlm.7.

Gubernur Akabri Umum Darat Mayjen A.Tahir, Gubernur Jawa Tengah Brigjen Moenadi, Ketua DPRD Jawa Tengah Imam Sofwan, lalu diikuti para bupati di daerah Kedu, para komandan kesatuan, wakil-wakil Partai Politik dan Ormas, serta segenap anggota DPRD Kabupaten Magelang.⁶ H. Achmad merupakan bupati ke enam Kabupaten Magelang, namun dilihat dari masa jabatan H.Achmad merupakan bupati pertama pada masa Orde Baru. Sosok H. Achmad mempunyai karakter yang kuat dan konsisten dengan pembangunan terencana melalui program Pelita. Pada awal masa pemerintahan H. Achmad, daerah Kabupaten Magelang memiliki masalah dalam bidang ekonomi, sarana dan prasarana yang menjadi masalah utama bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ekonomi dan sarana prasarana di Kabupaten Magelang, maka pendekatan baru yang dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan terencana dan terarah yang tertuang di dalam Pelita yang mendapat sambutan baik dari masyarakat.⁷

Pada tahun 1968 setahun setelah H. Achmad dilantik, ia merencanakan program pembangunan di bidang sarana prasarana, irigasi, pendidikan, industri, dan ekonomi. Pembangunan-pembangunan yang dirancang oleh H. Achmad telah disesuaikan dengan potensi yang ada dari setiap kecamatan. Program pembangunan di daerah Kabupaten Magelang adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.⁸ Agar tujuan tersebut tercapai, maka tujuan utama H. Achmad ialah memetakan daerah Kabupaten Magelang dalam jaring-jaring lalu lintas semaksimal mungkin. Dalam arti jalan dan jembatan yang sudah ada ditingkatkan lagi mutunya, bila memungkinkan dibuat jalan baru yang dapat menembus bukit dan menyusur

⁶“Drs.Achmad Dilantik Sebagai Bupati KDH Magelang”, *Suara Merdeka*, 16 Juli 1967.

⁷Tim Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, *Kabupaten Magelang Dari Masa Ke Masa* (Kabupaten Magelang: Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang,2010), hlm.75.

⁸ Mubyanto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* (Yogyakarta: Aditya Media,2000), hlm. 28.

jurang.⁹ Pemikiran atau gagasan yang menjadi ciri khas H. Achmad dalam membangun jaringan transportasi di Kabupaten Magelang ialah ‘*sarang laba-laba*’ atau ‘*jaring laba-laba*’. Dalam pemikiran tersebut, wilayah Kabupaten Magelang diibaratkan seperti lingkaran kemudi kapal dan yang menjadi poros adalah pusat pemerintahan Kabupaten Magelang. Pada tahap *pertama* poros tersebut dibuat jari-jari penghubung antara pusat dengan daerah-daerah kecamatan terdekat, misal dari Magelang-Bandongan, Magelang-Secang, Magelang-Tegalrejo dan seterusnya. Jari-jari penghubung tersebut ialah jalan dan jembatan, yang berfungsi sebagai penghubung antara pusat pemerintahan dengan semua kecamatan. Pada tahap *kedua* dibuat jari-jari penghubung antara kecamatan yang satu dengan yang lain, misal dari Secang-Grabag, Grabag-Tegalrejo, Tegalrejo-Mertoyudan, Mertoyudan-Borobudur, Borobudur-Mungkid dan seterusnya.

Untuk mewujudkan pembangunan jaringan transportasi antar kecamatan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan APBD Kabupaten Magelang secara nyata tidak dapat mencukupi biaya pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kepemimpinan H. Achmad dalam membangun Kabupaten Magelang tahun 1967-1979 menarik untuk dikaji dalam skripsi ini. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana H. Achmad melaksanakan pembangunan terutama dalam mewujudkan jaringan transportasi antar kecamatan di Kabupaten Magelang, meskipun APBD sangat terbatas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam skripsi ini diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana upaya H. Achmad untuk memperoleh dana APBD Kabupaten Magelang terutama untuk membiayai program jaringan transportasi antar kecamatan; *Kedua*, bagaimana pelaksanaan program pembangunan jaringan transportasi di Kabupaten Magelang; dan *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan pembangunan bidang lain di Kabupaten Magelang 1967 sampai dengan 1979.

⁹“Drs.Achmad Bupati KDH Magelang”, *Suara Merdeka*, 18 Juli 1974.

B. Ruang Lingkup

Pada skripsi ini, ruang lingkup digunakan untuk membatasi luasnya pembahasan. Penentuan ruang lingkup yang terbatas bukan saja lebih praktis dan lebih mempunyai kemungkinan untuk dikaji secara teknis, tetapi secara metodologis lebih bisa dipertanggungjawabkan.¹⁰ Dengan adanya batasan tersebut, diharapkan penulis mampu untuk menghindari hal-hal yang di luar batasan kajian penelitian yang telah dilakukan. Adapun ruang lingkup yang digunakan pada skripsi ini yaitu ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup keilmuan.¹¹

Ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah penelitian yang akan diangkat. Dalam penelitian skripsi ini ruang lingkup spasialnya adalah Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Kabupaten ini termasuk kabupaten yang dinamis hal ini dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang mulai tumbuh signifikan sejak tahun 1970-an. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh gencarnya pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang pada masa pemerintahan Bupati H. Achmad pada tahun 1967 sampai dengan 1979 sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana di segala bidang, terutama jaringan transportasi, irigasi, gedung-gedung sekolah, Bank Daerah dan industri. Beberapa bentuk hasil pembangunan yang paling besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Magelang antara lain, yaitu pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan antara daerah kecamatan dengan pusat pemerintahan. Pembangunan jalan tersebut juga menguntungkan masyarakat Kabupaten Magelang karena dapat digunakan sebagai akses untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Hasil pembangunan lainnya adalah pengaktifan kembali Bank Daerah di Kabupaten Magelang yang sempat tidak beroperasi kurang lebih 10 tahun. Pengaktifan kembali Bank Daerah telah berhasil membuat pemerintah menggali *funds and forces* yang ada di dalam wilayah

¹⁰Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

¹¹Taufik Abdullah, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. xxi.

Kabupaten Magelang. Kemampuan tersebut menjadi daya dukung yang luar biasa bagi pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Magelang.¹²

Ruang lingkup temporal merupakan batasan waktu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil masa antara tahun 1967 sampai dengan 1979. Tahun 1967 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa pada tahun tersebut merupakan saat pelantikan H. Achmad sebagai bupati di Kabupaten Magelang. Pada saat itu H. Achmad menggantikan posisi Adnan Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Magelang.¹³ H. Achmad terpilih menjadi Bupati Magelang selama dua periode. Pada periode pertama H.Achmad menjabat dari tahun 1967 sampai dengan 1972 kemudian setelah periode pertama usai, ia bertugas menjadi pejabat bupati selama 2 tahun yang berlangsung dari tahun 1972 sampai dengan 1974. Pada pemilihan berikutnya H.Achmad terpilih lagi menjadi Bupati Magelang pada 16 Februari 1974. Periode kedua berlangsung dari tahun 1974 sampai dengan 1979. Tahun 1979 dipilih sebagai batas akhir kajian karena merupakan tahun ketika berakhirnya masa jabatan H. Achmad sebagai Bupati Magelang.

Adapun, ruang lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah sosial ekonomi. Kajian sejarah sosial ekonomi difokuskan pada pembahasan tentang pembangunan jalur transportasi antar kecamatan. Dengan terbentuknya jaringan transportasi dapat memudahkan jalur perdagangan, di satu pihak daerah industri dengan daerah bahan mentah, di pihak lain daerah produksi dengan daerah pemasaran.¹⁴

¹²BP2KDE Kabupaten Magelang, *Dari Merapi Hingga Orde Reformasi* (Kabupaten Magelang: Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, dan Data Elektronik,2013), hlm.91.

¹³“Drs.Achmad Dilantik Sebagai Bupati KDH Magelang”, *Suara Merdeka*, 16 Juli 1967.

¹⁴Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1992), hlm.136.

Pada skripsi ini akan dibahas mengenai sejarah sosial ekonomi dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan ekonomi dengan harapan tidak hanya memperluas cakrawala ekonomi saja, tetapi juga menganalisis perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti jalur transportasi antar kecamatan. Lingkup keilmuan sejarah sosial ekonomi ini digunakan untuk membatasi bidang kajian. Maksud dari pembatasan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Magelang pada masa Bupati H. Achmad.

C. Tujuan Penelitian

Pendasaran utama dari ilmu sejarah ialah rekonstruksi dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, yang berupa penyusunan kembali peristiwa sebagaimana ia dimengerti.¹⁵ Berdasar pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, mendeskripsikan tentang bagaimana upaya Bupati H. Achmad memperoleh dana untuk pembangunan di Kabupaten Magelang. *Kedua*, mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan Bupati H. Achmad dalam mengatur pembangunan jaringan transportasi di Kabupaten. *Ketiga*, menganalisis proses dan pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat penting dalam penulisan skripsi karena berguna untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang terkait dengan penelitian skripsi ini. Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap pustaka yang menjadi landasan pemikiran, dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

¹⁵Taufik Abdulah, *Sejarah Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1985),hlm.2.

dikaji dalam penelitian ini.¹⁶ Berikut ini adalah tinjauan dari beberapa pustaka acuan yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

Pustaka *pertama* adalah buku yang berjudul *Memori Kecil Drs.H.Achmad*, yang disusun oleh Amir Machmud.¹⁷ Pustaka ini menjelaskan tentang biografi H. Achmad dari masa kecil sampai dewasa. Mula-mula buku ini menceritakan tentang latar belakang keluarga dan catatan pendidikan yang telah ditempuh oleh H. Achmad. Selain itu buku ini juga menjelaskan tentang aktivitas H. Achmad di dalam organisasi Nahdlatul'Ulama (NU). Saat setelah lulus menjadi sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan aktif di NU, H. Achmad menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman (Unsoed). Tidak lama kemudian H.Achmad dilantik menjadi bupati di Kabupaten Magelang. Pada saat menjabat sebagai bupati, H. Achmad menerapkan ilmu manajemen dalam menata wilayah Kabupaten Magelang. Selama 12 tahun dengan masa dua periode menjabat sebagai Bupati Magelang, H. Achmad telah berhasil menghubungkan dan memperlancar akses jalan-jalan daerah produksi dengan daerah pemasaran. Setelah menjabat sebagai Bupati Magelang, karir H. Achmad belum berakhir. Pada tahun 1979, ia diangkat menjadi pemimpin Direktorat Pembangunan Desa (Bangdes) Jawa Tengah. Pada akhir tahun 1990-an H. Achmad kembali ke dunia pendidikan dengan mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Pada tanggal 13 Maret 2000, H. Achmad kembali ke dalam bidang politik menjadi Wakil Gubernur I Jawa Tengah dan sebagai tugas terakhir di pemerintahan..

Relevansi dari buku tersebut terhadap penelitian penulis yaitu dapat digunakan untuk mengetahui latar belakang keluarga, pendidikan, dan organisasi yang menjadi pengaruh tokoh H. Achmad. Di samping itu, pustaka tersebut mampu memberikan penjelasan mengenai masa Bupati H. Achmad dalam

¹⁶Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm.19.

¹⁷ Amir Machmud, *Memori Kecil Drs.H.Achmad* (Semarang: Mimbar, 2001).

membangun jaringan transportasi Kabupaten Magelang pada tahun 1967 sampai dengan 1979.

Perbedaan yang mencolok dan mendasar antara pustaka tersebut dengan skripsi yang disusun oleh penulis ini ialah lingkup spasial, dan lingkup temporal. Lingkup spasial pada skripsi ini adalah wilayah Kabupaten Magelang, sedangkan pustaka tersebut tidak hanya mengkaji Kabupaten Magelang saja. Lingkup temporal pada skripsi ini tahun 1967 sampai dengan 1979, sedangkan pada pustaka tersebut temporalnya sampai tahun 2000-an.

Pustaka *kedua* adalah buku yang berjudul *Pemimpin itu Solusi*, yang disusun oleh Tim Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang.¹⁸ Pustaka ini menunjukkan kepemimpinan Bupati Magelang pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Mula-mula pustaka ini memuat penjelasan masa kepemimpinan Adnan Widodo yang menjabat sebagai Bupati Magelang pada masa Orde Lama tentang Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) pemerintahan Kabupaten Magelang yang diterbitkan untuk mengganti SK bekas peninggalan milik pemerintahan Belanda. Pada masa Orde Lama pengaruh Belanda dalam sistem hukum masih dirasakan. Sebagai contoh, peraturan dan sistem hukum di Pasar Swasta Kabupaten Magelang merupakan kebijakan warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sehingga pada tahun 1961 Bupati Adnan Widodo berusaha mengganti beberapa Perda di Pasar Swasta. Selanjutnya pustaka ini menceritakan Kabupaten Magelang pada waktu pertengahan tahun antara 1960 sampai 1970, yang terjadi peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan tersebut membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat dari segi nasional dan lokal. Pada tingkat lokal di Kabupaten Magelang juga terjadi perubahan kepemimpinan dari bupati Orde Lama yaitu Adnan Widodo kepada bupati Orde Baru H. Achmad. Perubahan kepemimpinan tersebut ditandai dengan perubahan peran pemerintah dari pengarah menjadi penentu. Hal ini terlihat pada perda-perda yang terbit antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1966. Saat memasuki Orde Baru, Perda

¹⁸Tim Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, *Pemimpin itu Solusi* (Kabupaten Magelang: Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang,2013)

yang dikeluarkan mulai banyak mengatur tentang program pembangunan sarana dan prasarana dengan pemerintah sebagai penentu.

Relevansi buku tersebut terhadap penelitian skripsi ini yaitu menunjukkan perbedaan kepemimpinan dan perda-perda antara bupati pada era Orde Lama dan Orde Baru. Lampiran-lampiran tentang kebijakan dan program pembangunan yang ikut dilampirkan dalam buku ini, membantu penulis dalam membandingkan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan pada masa bupati di era Orde Lama dan juga Orde Baru. Dalam hal ini H.Achmad merupakan bupati pertama Kabupaten Magelang pada era Orde Baru. Melalui buku ini dapat diketahui mengenai Bupati H. Achmad dalam upaya membangun Kabupaten Magelang pada Pelita I.

Perbedaan yang terlihat jelas pada pustaka tersebut dengan skripsi ini adalah ruang temporal. Skripsi ini hanya mendeskripsikan masa Bupati H. Achmad dalam membangun jaringan transportasi Kabupaten Magelang pada 1967 sampai dengan 1979, sedangkan pustaka tersebut memiliki ruang temporal pada 1960 samapai dengan 1979.

Pustaka *ketiga* adalah *Dari Merapi Hingga Orde Reformasi*, yang ditulis oleh Tim BP2KDE Kabupaten Magelang.¹⁹ Pustaka ini menunjukkan sejarah para bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Magelang, dari Bupati pertama sampai yang terbaru. Pustaka ini juga menceritakan tentang kebijakan masing-masing Bupati Magelang di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan Kabupaten Magelang dibawah pemerintahan Bupati H. Achmad pada masa jabatannya dijelaskan secara singkat. Terdapat poin-poin dalam masa pemerintahan H.Achmad, antara lain keamanan dan ketertiban. Pemberantasan pelacuran merupakan salah satu kebijakan H. Achmad untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Magelang. Kontribusi kepemimpinan H. Achmad saat menjabat menjadi bupati dijelaskan secara umum dan mengulas tentang kebijakan Perda Kelembak. Tanaman klembak pada tahun 1970-an

¹⁹BP2KDE Kabupaten Magelang, *Dari Merapi Hingga Orde Reformasi* (Kabupaten Magelang: Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, dan Data Elektronik,2013)

menjadi komoditas andalan di Kabupaten Magelang. Tanaman kelembak merupakan tanaman yang diabadikan dalam lambang pemerintahan Kabupaten Magelang bersama-sama dengan tanaman vanili dan tembakau. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan pendekatan baru untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Magelang. Pada masa kepemimpinan H. Achmad banyak dibangun jalan dan gedung-gedung sekolah untuk meningkatkan perekonomian dan pendidikan masyarakat Kabupaten Magelang. Kesehatan juga ditulis dalam buku ini, pada masa H. Achmad baru dimulai penerapan program KB yang dilaksanakan melalui sosialisasi ibu-ibu PKK di setiap kecamatan.

Relevansi buku tersebut terhadap penelitian penulis yaitu dapat memberikan wawasan tentang sejarah urutan bupati di Kabupaten Magelang dari masa ke masa. Buku ini membantu penulis untuk mengetahui nama-nama bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Magelang dari era Orde Lama hingga masa Reformasi. Buku ini dapat digunakan untuk mengetahui kebijakan para bupati dalam pembangunan selama masa jabatannya. Di dalam buku tersebut terdapat informasi tentang masa kepemimpinan dan peran H. Achmad selaku Bupati Magelang periode tahun 1967 sampai dengan 1979 yang dapat dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini. Peran tersebut mencakup dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya.

Perbedaan yang terlihat jelas pada pustaka tersebut dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah ruang temporal. Di dalam buku tersebut menjelaskan secara singkat urutan Bupati Magelang dari masa Kolonial sampai Reformasi, sedangkan skripsi ini menganalisis secara rinci dan lebih mendalam masa kepemimpinan H. Achmad dalam membangun Kabupaten Magelang 1967 sampai dengan 1979.

Pustaka *keempat* adalah *Catatan Kabupaten Magelang di Awal Kemerdekaan*, yang ditulis oleh Tim Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang.²⁰ Pustaka ini menjelaskan mengenai kondisi dan pembangunan

²⁰ Tim Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, *Catatan Kabupaten Magelang di Awal Kemerdekaan* (Kabupaten Magelang: Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, dan Data Elektronik, 2011)

Kabupaten Magelang pada 1950 sampai 1960. Pembangunan tersebut meliputi bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Relevansi buku tersebut terhadap penelitian penulis yaitu dapat menjadi studi analisis tentang perbedaan pembangunan pada awal kemerdekaan dengan yang dilakukan pada awal Orde Baru. Pada buku tersebut menjelaskan bahwa kondisi Kabupaten Magelang di awal kemerdekaan terdapat beberapa pembangunan di bidang ekonomi seperti koperasi, dan Bank Pasar yang pada awalnya bertujuan untuk menunjang perekonomian daerah. Meskipun Bank Daerah pada waktu itu menuai kegagalan, pada akhirnya Bank Pasar dapat dibangun lagi dan berhasil pada saat H.Achmad menjadi Bupati Magelang.

Perbedaan yang terlihat jelas pada pustaka tersebut dengan skripsi ini adalah ruang temporal. Skripsi ini mendeskripsikan pada masa Bupati H. Achmad antara 1967 sampai dengan 1979 dalam membangun sosial ekonomi Kabupaten Magelang, yang salah satunya ialah pembangunan Bank Daerah. Ruang temporal pada pustaka tersebut mendeskripsikan keadaan Kabupaten Magelang pada 1950 sampai dengan 1960.

Berbeda dengan karya-karya di atas, skripsi ini fokus membahas mengenai Bupati H. Achmad dalam membangun Kabupaten Magelang tahun 1967 sampai dengan 1979. Penelitian skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti oleh para peneliti sebelumnya, sehingga skripsi ini masih orisinal. Diharapkan melalui skripsi ini akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Magelang masa Bupati H. Achmad antara 1967 sampai 1979.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan permasalahan pada skripsi ini, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian ini diambil dari teori konsep pada usaha pembangunan transportasi antar kecamatan yang dilaksanakan oleh Bupati H. Achmad di Kabupaten Magelang 1967-1979.

Pembangunan adalah proses yang dimulai dari negara maju melalui negara berkembang yang diturunkan kepada rakyat. Masalah-masalah pembangunan

merupakan suatu jalinan dari masalah sosial, ekonomi, politik, administrasi, dan sebagainya yang saling berpengaruh dan berkaitan satu sama lain. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan prasarana adalah pembangunan dasar kehidupan di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi untuk mendorong masyarakat untuk mencapai modernisasi, yang meliputi perubahan institusional untuk mendukung usaha nasional dan mengembangkan kemudahan seperti transportasi, komunikasi, dan sistem perhubungan.²¹

Secara konseptual, pembangunan termasuk kota atau daerah, yaitu pembangunan yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pembangunan ini tentunya ditempuh dengan cara terus menerus dan menggunakan sumber daya yang ada, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.²²

Pembangunan nasional dan daerah masih harus dikembangkan terus-menerus, oleh karena itu pemikiran dasar dan pengembangannya harus bertolak dari pandangan hidup Pancasila, dari kepribadian bangsa sendiri, dan dari pengalaman sejarah sendiri yang tidak ternilai harganya. Keberhasilan pembangunan nasional akan mempengaruhi tercapainya stabilitas nasional, sebab terpeliharanya pelaksanaan dan lajunya pembangunan nasional harus tetap terjaga dan dikembangkan terus. Peraturan dan kebijakan tidak boleh diartikan sebagai pengekan kebebasan, dinamika, kreativitas dan kemerdekaan masyarakat.²³

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan juga meliputi proses pengambilan keputusan

²¹Santi Siahaan, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2001), hlm.2.

²² Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm.38.

²³Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen* (Bandung: Nusa Media, 2005), hlm.72.

dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Masalah pengembangan dan pembangunan sosial ekonomi yang ada di masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Potensi yang ada di dalam masyarakat harus dikembangkan untuk kondisi hidup yang lebih baik di masa depan.²⁴

Pemerintah Orde Baru merencanakan pembangunan nasional melalui Repelita yang dimulai pada tahun 1969, pembangunan nasional telah menjadi salah satu landasan untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat. Secara singkat pembangunan sangat dipengaruhi oleh manusia yang berkepentingan termasuk para pemimpin, masyarakat, tata perundangan yang mendukung. Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting demi mencapai sebuah keberhasilan pembangunan yang diidamkan oleh semua kalangan.²⁵

Transportasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan kegiatan pelayanan transportasi memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi seperti jaringan jalan. Suatu sistem jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi dan berbagai tempat asal menuju ke berbagai tempat tujuan yang tersebar di berbagai pelosok wilayah. Jaringan transportasi yang memadai dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas, membantu mendorong perkembangan wilayah, dan memperkokoh kehidupan sosial ekonomi masyarakat.²⁶

Konsep pembangunan sangat erat kaitannya dengan tokoh pemimpin yaitu H. Achmad selaku Bupati Magelang periode 1967 sampai 1979. Bupati merupakan sebuah jabatan yang berwenang memimpin sebuah kabupaten. Sebagai seorang pemimpin suatu daerah tentu memiliki pengaruh dalam pembangunan

²⁴Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), hlm.12.

²⁵Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, hlm.73.

²⁶ Sakti Adji Adisasmita, *Jaringan Transportasi; Teori dan Analisis* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011), hlm.14.

daerah.²⁷ Bupati H. Achmad menentukan arah pembangunan terutama pembangunan jaringan transportasi antar kecamatan selama masa jabatannya melalui kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan. Selain pembangunan jaringan transportasi adapun pembangunan di berbagai bidang yang telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Magelang seperti bidang irigasi, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pemerintah, Bank Daerah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada masalah daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh H. Achmad merupakan langkah untuk memajukan sosial ekonomi baik untuk masyarakat atau pemerintah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang disesuaikan dengan masalah yang ada, seperti masalah jalan-jalan yang rusak antara daerah produksi dengan pemasaran. Kerusakan jalan tersebut dapat menghambat kegiatan perdagangan antara petani hasil bumi dengan pembeli, sehingga kebijakan pembangunan jalan-jalan menjadi masalah utama. Adanya pembangunan-pembangunan tersebut dapat memberi pengaruh pada kemajuan sosial ekonomi di Kabupaten Magelang.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek. Dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Metode penelitian selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu.²⁸ Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tentang Keberhasilan Bupati H. Achmad dalam Membangun Kabupaten Magelang pada tahun 1967 sampai dengan 1979.

²⁷ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 49.

²⁸ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 50.

Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik yaitu suatu kegiatan untuk menghimpun dan mengumpulkan sumber-sumber setelah terlebih dahulu dilakukan pemilihan topik untuk penelitian. Langkah heuristik digunakan untuk mendapatkan data mengenai keberhasilan Bupati H. Achmad dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Sumber sejarah memberi penjelasan dan gambaran tentang peristiwa masa lampau. Adapun sumber sejarah yang dipergunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer disebut juga dengan sumber pertama atau sumber asli, yaitu bukti yang kontemporer dengan suatu peristiwa yang terjadi.²⁹

Adapun sumber primer lisan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung yang terkait pada masa Bupati H. Achmad di Kabupaten Magelang 1967-1979. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang terlibat secara langsung dalam peristiwa. Para informan yang menjadi narasumber dalam pengumpulan sumber primer lisan ini antara lain, H. Achmad selaku Bupati Magelang, dan para staf atau pegawai yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Magelang pada waktu itu.

Sumber primer tertulis adalah arsip-arsip yang dimiliki oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah Kabupaten Magelang, koran-koran yang diperoleh dari kantor arsip *Suara Merdeka*, serta foto-foto kegiatan H. Achmad di Kabupaten Magelang, buku Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah TK.II Magelang 1979 yang diperoleh dari kantor dinas kecamatan Tegalrejo, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Magelang, Laporan Kegiatan Pembangunan yang diperoleh dari kantor badan pusat statistik Kabupaten Magelang.

Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dalam kajian penelitian. Ada pula penelitian skripsi, jurnal, thesis yang telah membahas Kabupaten Magelang dari berbagai aspek dan sudut pandang. Penggunaan sumber sekunder juga berfungsi sebagai pendukung sumber primer.

²⁹Sjamsuddin Helius, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta:Ombak, 2007), hlm. 107.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Data sejarah yang sudah terkumpul, dikritik untuk memperoleh keabsahan sumber.³⁰ Sumber sejarah yang digunakan sebagai sumber tulisan memberikan informasi berupa data yang diklasifikasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, hingga akhirnya diperoleh sebuah fakta mengenai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang pada masa Bupati H. Achmad. Sumber dan informasi yang diterima dari berbagai pihak dibanding-bandingkan atau dengan menggunakan teknik komparasi agar dapat terlihat data mana yang paling mendekati kebenaran.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yang berusaha saling mengaitkan antar fakta yang satu dengan yang lain. Pada tahap ini ada penyeleksian fakta untuk mendapatkan relevansi dalam penyusunan topik penulisan sejarah dan untuk melakukan serialisasi fakta-fakta sejarah yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah dilakukan kritik baik interen maupun eksteren. Serialisasi memuat unsur kronologi dan kausalitas mengenai pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Magelang pada masa Bupati H. Achmad.

Tahap keempat atau tahap terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lalu.³¹ Dalam tahap ini fakta sudah dapat diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga dihasilkan historiografi yang baik sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku agar dapat dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan laporan penelitian ini runtut dan mudah dipahami, maka perlu teknik penulisan secara sistematis. Skripsi yang berjudul “Keberhasilan

³⁰ Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta:Ombak, 2011), hlm. 108.

³¹Gottscalk Louis, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 94.

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Masa Bupati H.Achmad 1967-1979” ini mula-mula diawali dengan Bab I atau “Pendahuluan”, yang menjadi dasar dan panduan bagi pembaca untuk mengetahui inti permasalahan dalam skripsi ini, yaitu latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Berbagai persoalan penelitian yang diajukan dalam permasalahan pada Bab I, akan dideskripsikan dan dianalisis pada Bab II sampai IV. Pada Bab II diuraikan tentang “Gambaran Umum Kabupaten Magelang Tahun 1960-1970” yang memuat kondisi geografis, demografis, sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik. Pembahasan ini disajikan untuk memberi gambaran umum mengenai perkembangan Kabupaten Magelang pada saat dipimpin oleh H.Achmad.

Pembahasan tentang “Tokoh Bupati H.Achmad dan Upaya Mendapatkan Biaya Pembangunan” disajikan dalam Bab III, yang mengkaji seputar H.Achmad saat menjabat menjadi Bupati Magelang. Pada awal pembahasan dikaji tentang latar belakang keluarga H.Achmad, pendidikan, organisasi dan perjalanan hidup, yang menjadi dasar dan pengaruh bagi tokoh H.Achmad. Terutama pelajaran hidup dari orang tua sangat terikat dengan tokoh H.Achmad yang memiliki karakter disiplin dan tegas dalam memimpin birokrasi di Kabupaten Magelang. Pembahasan selanjutnya adalah tentang Kebijakan H.Achmad di Kabupaten Magelang yang dapat memecahkan masalah dan menjadi solusi dalam permasalahan utama yaitu masalah anggaran. Banyaknya pembangunan tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak sedangkan kondisi pada waktu itu APBD sangat menipis, sehingga H.Achmad melakukan cara untuk menambah anggaran dengan kebijakan seperti Retribusi Daerah.

Puncak pembahasan dalam skripsi ini ialah tentang “Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kabupaten Magelang”. Bab IV ini akan menyajikan hasil analisis terkait keberhasilan Bupati H.Achmad dalam pembangunan di Kabupaten Magelang yang meliputi bidang jaringan transportasi, irigasi, gedung-gedung sekolah, Bank Daerah, dan lain-lain. Kondisi jalan-jalan Kabupaten Magelang yang rusak parah seperti kali asat menjadi penghambat arus perdagangan, dan kegiatan sosial lainnya. Pembangunan jaringan transportasi

menjadi hal utama H.Achmad guna memperlancar roda perekonomian antara daerah produksi dengan daerah pemasaran.

Pembangunan selanjutnya pada bidang irigasi dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pertanian untuk meningkatkan hasil panen, yang dapat membantu pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh APBD. Bupati H. Achmad juga telah berhasil membangun Bank Daerah Kabupaten Magelang, yang sebelumnya sempat gagal beroperasi. Pada saat Bank Daerah belum dibangun pemerintah Kabupaten Magelang menyimpan APBD di bank-bank swasta, dengan adanya Bank Daerah tersebut dana APBD lebih mudah dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diajukan pada latar belakang permasalahan. Jawaban tersebut dibahas secara mendalam di Bab II, III, dan IV, yang kemudian dijelaskan secara singkat melalui kesimpulan dalam Bab V.